

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP HAK IMUNITAS  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD  
(PASCA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018)**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

**TRY FERAYANTI**

(11427203703)

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP HAK IMUNITAS  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD  
(PASCA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

**TRY FERAYANTI****(11427203703)****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**Skripsi dengan judul :** “ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018)” yang ditulis oleh :

Nama : Try Ferayanti

NIM : 11427203703

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

PERI PIRMANSYAH, SH, MH.

NIK. 130 217 120

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, “Analisis Kewenangan Preseiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)” yang ditulis oleh :

Nama : TRY FERAYANTI  
NIM : 11427203703  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA.**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SHi., MA.**

Penguji 1  
**Lysa Angrayni, SH., MH.**

Penguji 2  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TRY FERAYANTI  
 NIM : 11427203703  
 Tempat/ Tanggal Lahir : AEK NABARA, 5 FEBRUARI 1996  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS KEWENANGAN PRESEIDEN TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018)" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Desember 2019  
 Yang membuat pernyataan



TRY FERAYANTI  
 NIM. 11427203703

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)s**”.

Presiden memegang peranan penting dalam hal kekuasaan negara. Sebagai pelaksana kekuasaan Eksekutif dalam hal penyelenggaraan negara, Presiden perlu memperhatikan *checks and balances* antara kekuasaan negara yang lainnya yaitu legislatif dan yudikatif.

Perihal kekuasaan Presiden dengan lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, dalam ketentuan pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 224, harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Hal yang menjadi perhatian adalah kewenangan Presiden dalam hal pemberian ijin tertulis dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori hukum dengan teknik pengumpulan data *library research* yang mengkaji berbagai dokumen terkait dengan objek penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Presiden terhadap hak imunitas anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahahn kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, bagaimana hak imunitas anggota DPR Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden dalam hal hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasca Putusa MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 tidak sesuai dengan kaidah hukum terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum dan indenpedensi peradilan.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata yang maha memiliki, mengatur dan menguasai alam semesta. Berkat ridho dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)”, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti saat ini.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

Ayahanda Adnan dan Ibunda Sutini, S.Pd yang tercinta, yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk saya agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita, dan juga kepada saudari perempuan paling cantik Ika Adriyani, SH, saudara laki-laki paling tampan Dwi Ristyandi S.Pd.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. KH. Akhmad Muhajidin MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S. Ag, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S. Ag, SH, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Dr. Hertina, M.Pd. Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penullis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk rekan seperjuangan seperantauan Novita Pitriana Sir SH, Fitri Sarah Aryani Rambe S.I.kom, Cindy Yuristie, S.I.Kom, dan kawan-kawan kos yang lain.

Kepada ayunda-ayunda hebat yang dipertemukan dalam darah hijau hitam Nuryanti, SE. Sy, ME, Sy, Melsya Trivianti S. Pi, M. Si, Nur habibah Nasution, SP yang mengalirkan darah pejuang perempuan bagi saya. Jayalah Kohati!

10. Kepada keluarga besar HMI Komisariat SUPER UIN SUSKA RIAU yang telah menjadi wadah untuk berproses senantiasa menjadi insan cita terkhusus kanda M Nur Latif SH selaku Ketua Umum sekaligus abang selama perkuliahan. Yakin Usaha Sampai!

11. Seluruh teman-teman urusan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya local Ilmu Hukum F (IH F) dan teman-teman konsentrasi HTN local D, yang telah memberikan semangat kepada penulis selama belajar di kelas.

12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebut nama satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini kiranya dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembacanya. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

**TRY FERAYANTI**  
**NIM: 11427203703**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah. ....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. ....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II      TINJAUAN UMUM</b>	
A. Negara Hukum. ....	13
1. Pengertian Negara Hukum .....	13
2. Asas Negara Hukum .....	15
3. Konsep Negara Hukum .....	17
4. Tipe Negara Hukum .....	44
B. Trias Politica. ....	47
1. Pengertian Trias Politica .....	47
2. Teori Trias Politica .....	48
C. Sistem Pemerintahan .....	62
1. Pengertian Sistem Pemertintahan .....	62
2. Asas Umum Pemerintahan .....	64
3. Bentuk-Bentuk Sistem Pemerintahan .....	67
 <b>BAB III      TINJAUAN TEORITIS HAK IMUNITAS DEWAN RAKYAT</b>	
A. Hak Imunitas. ....	75
1. Pengertian Hak Imunitas .....	75



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk-Bentuk Hak Imunitas .....	79
3. Tujuan Hak Imunitas .....	81
4. Batasan Hak Imunitas .....	83
B. Dasar Hukum.....	86

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ....	92
B. Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. ....	103

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	110

#### DAFTAR PUSTAKA

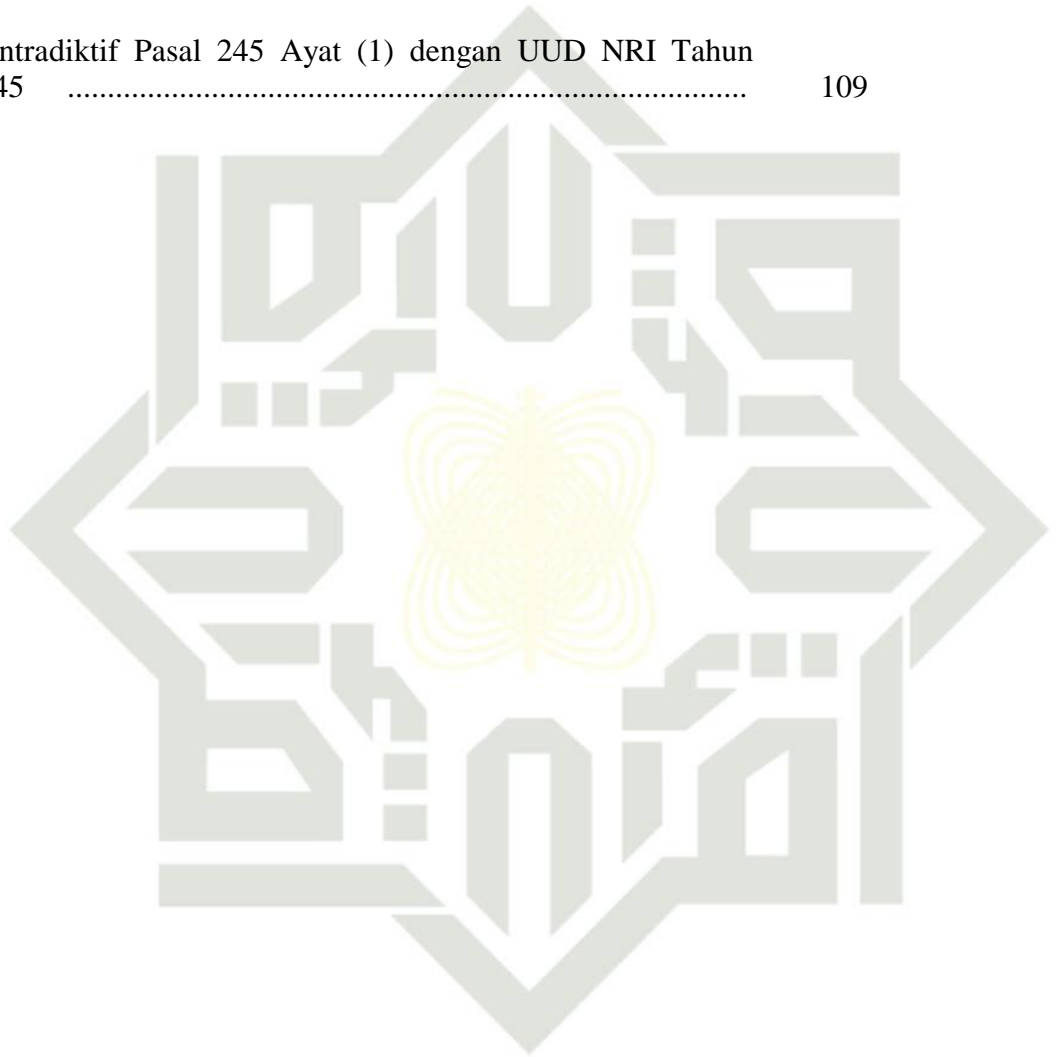


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Hak Imunitas Anggota DPR.....	93
Tabel I.2	Kewenangan Presiden Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	96
Tabel I.3	Perubahan Pasal 245 Ayat (1) .....	105
Tabel V.1	Kontradiktif Pasal 245 Ayat (1) dengan UUD NRI Tahun 1945 .....	109



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MA	: Mahkamah Agung
MD3	: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
UUD	: Undang-Undang Dasar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada BAB I dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan negara kesatuan yang berbentuk republik yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat dilihat dengan diselenggarakannya pemilihan umum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Sebagai hasil pemilu, terbentuklah lembaga-lembaga parlemen dalam tata pemerintahan sesuai dengan tingkatannya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan parlemen pada tingkat daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan telah membentuk alat-alat kelengkapan seperti komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPR memiliki peran yang besar dan sebagai lembaga negara yang mengisi kekuasaan Legislatif. DPR dipilih melalui pemilihan umum diharapkan dapat menjadi representasi rakyat Indonesia. Representasi dalam hal ini dapat diartikan secara substantial bahwa keterwakilan rakyat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap DPR baru dapat disalurkan apabila kepentingan nilai, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh parlemen<sup>1</sup>.

DPR memiliki fungsi yang terbagi menjadi tiga yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak sebagai anggota parlemen yang tercantum dalam Konstitusi Pasal 20A ayat (3) yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga tersebut terus mengalami perubahan dengan substansi yang menjadi polemik. Dari sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sampai saat ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Perubahan tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik, sehingga mengundang polemik. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah perihal hak imunitas dari DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di atur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.<sup>2</sup> Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Hal 305

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Afika. Hal 158

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kekuasaan tersebut memberikan peluang Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk melahirkan sebuah produk hukum yang lebih menguntungkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan politik bukan untuk kepentingan rakyat. Pro kontra pengesahan perubahan Undang-Undang MD3 begitu ramai di berbagai media. Perubahan tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik yang hanya mengakomodir kepentingan anggota DPR saja.

Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berbunyi “selain hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.<sup>3</sup> Selain hak-hak tersebut DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak imunitas anggota DPR tidak dimiliki DPR karena memang hak imunitas melekat kepada subjek hukum pribadi, bukan lembaga.

Hak imunitas di atur dalam UUD 1945 dimana bagi anggota DPR diberikan jaminan konstitusional untuk tidak ragu-ragu, takut, khawatir untuk menyatakan sikap dan pendapatnya dalam forum-forum rapat DPR, apapun juga sikap dan pendapat tersebut. Dengan adanya hak imunitas ini, anggota DPR dapat menyatakan pendapat secara bebas, tajam, kritis dan objektif terhadap suatu permasalahan atau dalam kondisi forum rapat DPR tanpa dibayangi keragu-raguan dan kecemasan.<sup>4</sup> Konstitusi juga telah membekali mereka dengan jaminan tidak akan dituntut atas ucapan nya selama diucpkan

<sup>3</sup> Patrialis Akbar, 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*.

Jakarta: Sinar Grafika. Hal 64

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 65



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam forum rapat DPR. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tuntutan hukum dengan dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada ucapan yang disalah artikan oleh pihak lain yang tidak suka.

Hak imunitas juga di atur dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di Luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, pasal 245 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Selanjutnya Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri beranggotakan anggota DPR yang dinilai tidak independen dan sarat akan kepentingan, sehingga banyak yang memprotes terkait pasal hak imnitas DPR karena cenderung terlihat melindungi dan membentengi anggota DPR yang terlibat tindak pidana agar kebal hukum.

Sepanjang perjalanan Undang-Undang MD3 ini, setelah diadakannya perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 di gugat untuk *judicial review* oleh beberapa pihak karena atas pasal 245 ayat (1) yang kemudian melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Dalam putusan tersebut, pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dihapuskan dan hanya persetujuan tertulis dari Presiden.

Lalu kewenangan presiden dalam hal memberikan persetujuan tertulis juga dipertanyakan terkait upaya hukum yang terdapat dalam pasal 245 ayat (1) tersebut. Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada personal anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menjadi perhatian khusus terkait hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kewenangan DPR yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Salah satunya mengambil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk melakukan perubahan Undang-Undang MD3. Dalam melihat pentingnya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018).

#### B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah pada Hak Imunitas anggota DPR setelah berlakunya pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Presiden terhadap hak imunitas anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana hak imunitas Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan Presiden terhadap hak imunitas anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
- b. Untuk mengetahui hak imunitas Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan Presiden terhadap hak imunitas anggota DPR berdasarkan pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelsaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis menggunakan metode penlitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi documenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala , atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>6</sup>Di dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara tepat mengenai kewenangan Presiden terhadap hak imunitas anggota

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)

<sup>6</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR berdasarkan pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>7</sup> Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat ahli yang dikutip dari buku-buku, jurnal, makalah dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni dalam bentuk kamus, kamus hukum, ensiklopedi, maupun jurnal hukum lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti, yaitu Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat.

### 4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diolah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif,<sup>8</sup> Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

### Sistemasika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri dan saling berkaitan, dan memuat suatu rangkaian utuh, lebih jelasnya sebagai berikut:

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 183-192

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang.
- B. Batasan Masalah.
- C. Rumusan Masalah.
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM**

- A. Teori Negara Hukum
- B. Teori *Trias Politica*
- C. Sistem Pemerintahan

**BAB III: TINJAUAN TEORITIS HAK IMUNITAS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT**

- A. Pengertian Hak Imunitas
- B. Tujuan Hak Imunitas
- C. Batasan Hak Imunitas
- D. Dasar Hukum

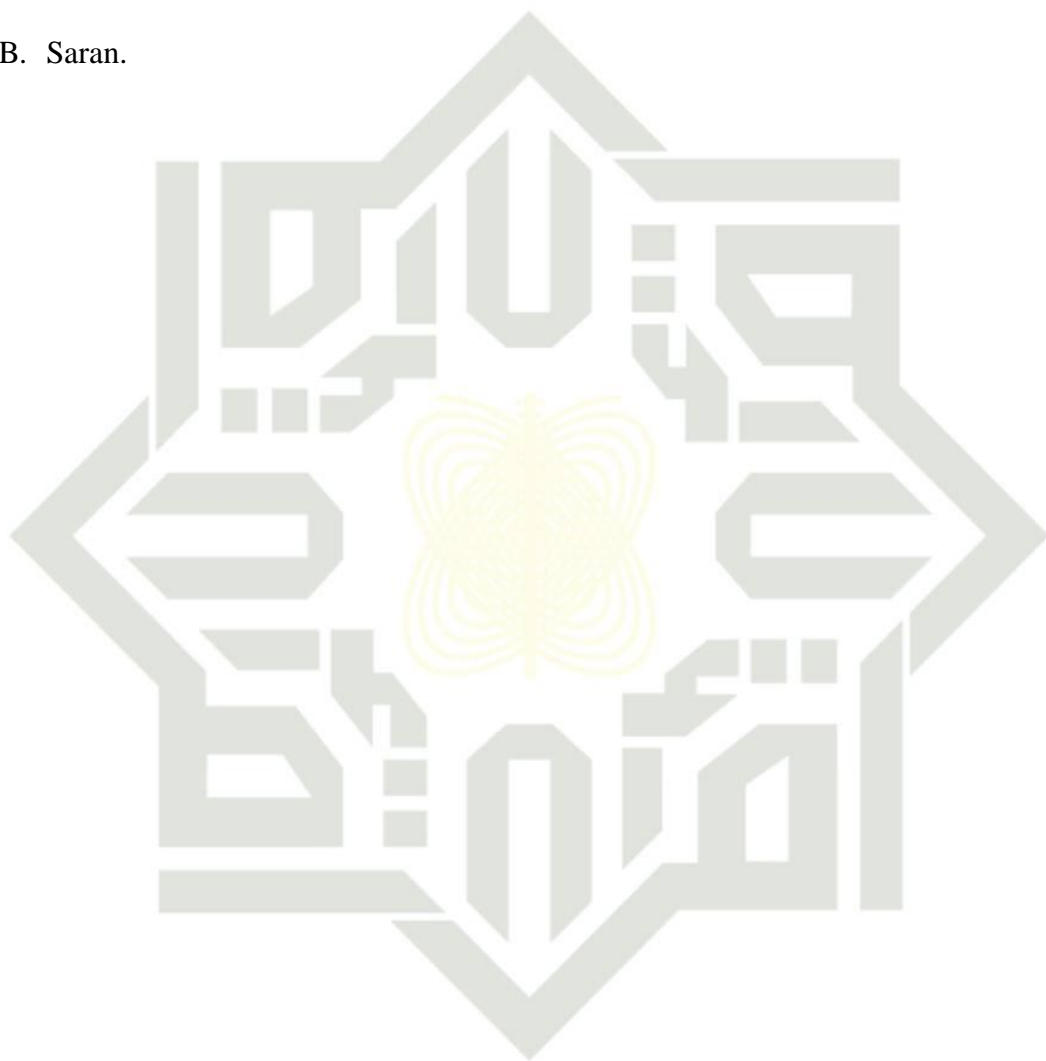
**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

- B. Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

## **BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.



UIN SUSKA RIAU

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A Negara Hukum

##### 1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum formal merupakan gambaran bentuk ideal yang dapat dipikirkan manusia, sekaligus dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kenyataan. Konsepsi bentuk negara ideal bagi tiap bangsa tidak selalu sama sehingga pemahaman negara hukum tidak selalu sama bagi berbagai bangsa.<sup>9</sup>

Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu *Rechtsstaat* dan masuk ke dalam perpustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda, *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang ketika itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, sekalipun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun.<sup>10</sup>

Daud Busro dan Abu bakar Busro mengemukakan, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.<sup>11</sup> Negara hukum yang didefinisikan Abu Daud Burso dan Abu Bakar Burso sebagai negara yang berdasarkan hukum disebut Burkens

<sup>9</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Penerbit Erlangga, 2010) h. 46

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>11</sup> Hotma P. Sibuea, *Ibid*, h. 48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai negara yang “.... yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum”. Dalam Suatu negara hukum, sesuai dengan pendapat Burkens di atas, setidaknya hukum memiliki dua macam fungsi, yakni sebagai dasar kekuasaan negara dan sebagai pedoman penyelenggara kekuasaan negara.<sup>12</sup>

R. Djokosutomo mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.<sup>13</sup>

Selanjutnya penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas). Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa : “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar konstitusional bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan bernegara (*supremacy of law*).

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (PT Kineka Cipta, 2008) h. 87

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ismail Sunny mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:<sup>14</sup>

- a. Menjunjung tinggi hukum
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedy-remedy procedural untuk mempertahankannya
- d. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

### 2. Asas Negara Hukum

Konsep negara hukum dalam modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *Rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika dalam konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Ibid*, h. 87

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 130



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu<sup>16</sup>:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the Law*.
- c. *Due Process of Law*.

*International Commission of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya proteksi konstitusional.
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas.
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
- e. Adanya tugas oposisi.
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, h. 130

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 131

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, h. 131-132

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan Kekuasaan.
- e. Organ-organ Penunjang yang Idependen.
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- j. Bersifat Demokratis (*Democratishe Rechtsstaat*).
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*).
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

### 3. Konsep Negara Hukum

Dalam perkembangan sejarah pemikiran dan praktik negara hukum ditemukan adanya beberapa konsep negara hukum. Dari pemikiran ahli dan praktik ketatanegaraan di Eropa ditemukan adanya tipe Negara Hukum *Anglo Saxon* yang berasal dari konsep *rule of law* dan Negara Hukum *Eropa Kontinental* yang berasal dari konsep *rechtsstaat*. Selain kedua tipe tersebut di negara-negara komunis juga berkembang Negara Hukum Sosialis atau yang disebut dengan *socialist legality*. Di kalangan negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan berkembang tipe Negara Hukum Islam yang lazim disebut *Nomokrasi*

*Islam*. Sedang Indonesia yang mempunyai hubungan historis dengan negara-negara Eropa Kontinental, dalam perkembangannya berusaha mengembangkan konsep negara hukum khas Indonesia yang disebut dengan Negara Hukum Pancasila.<sup>19</sup>

#### a. *Negara Hukum Anglo Saxon (Rule of law)*

Pada mulanya ide negara hukum berkaitan dengan praktek negara polisi di Eropa Barat yang memiliki dua fungsi, yaitu mengupayakan kemakmuran dan ketertiban. Namun dalam kenyataannya para raja tetap saja memerintah secara sewenang-wenang, mulai Raja Lois VIII sampai Louis XIV (Perancis), Raja Philip II sampai Willem van Oranje (Belanda), Raja Isabella sampai Ferdinand (Spanyol), Raja Henry II dan Henry III sampai Oliver Cromwell (Inggris).<sup>20</sup>

Ketika Inggris dilanda krisis finansial akibat peperangan dan penaklukan, memaksa Raja John I membuka akses bagi para bangsawan untuk terlibat dalam aktifitas pemerintahan dengan menerima kesepakatan *Magna Charta*. Selain para bangsawan, terlibat pula dalam pemerintahan adalah para penyumbang dana terbesar (pengusaha) dan para cendekiawan. Keterlibatan bangsawan, pengusaha, dan cendekiawan dalam pemerintahan ini menjadi cikal

<sup>19</sup> A Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, (Malang: UNM Press, 2016), h. 5

<sup>20</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995), h. 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakal parlemen Inggris yang disebut *House of Lord*. Dalam perkembangannya, selain para bangsawan, pengusaha, dan cendekiawan, rakyat biasa juga meminta hak mereka untuk terlibat dalam pemerintahan. Keterlibatan rakyat biasa dalam pemerintahan ini juga menjadi cikal bakal parlemen Inggris yang disebut *House of Common*.<sup>21</sup>

Perjuangan rakyat Inggris selama berabad-abad dalam menentang absolutisme tersebut menjadi inspirasi bagi Albert van Dicey dalam menyusun bukunya *Introduction to the study of the law of the constitution* (1885) yang memperkenalkan konsep negara hukum Inggris Abad XIX. Dalam khasanah kenegaraan Inggris, negara hukum yang dimaksud adalah konsep *Rule of Law*.<sup>22</sup>

Pemikiran *rule of law* mulai tampak di Inggris ketika masa pemerintahan Raja Henry II (1164) yang menghasilkan naskah *constitution of clarendon*. Kemudian disusul pada masa pemerintahan John I dengan naskah *Magna Charta* (1215). Naskah tersebut di antaranya berisikan perihal pembatasan atas kekuasaan raja di bidang perpajakan dan hak milik warga negara. Hal ini yang selanjutnya mengilhami naskah *Bill of Rights* pada masa pemerintahan Raja William pada tahun 1689.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 37

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 39

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dicey ada tiga unsur utama dari *rule of law*, yaitu: (a) *supremacy of law*; (b) *equality before the law*; (c) *constitution based on individual right*. Unsur *supremacy of law* mengandung pengertian negara diatur oleh hukum dan individu hanya mungkin dihukum jika melanggar hukum. Unsur *equality before the law* mengandung arti bahwa semua warga negara baik rakyat maupun pejabat taat pada hukum yang sama (*ordinary court*), dan jika melanggar hukum diadili di pengadilan yang sama. Unsur *constitution based on individual right* mengandung pengertian bahwa konstitusi sebagai undang-undang dasar merupakan generalisasi dari praktik atau kebiasaan yang sudah berlangsung dalam praktik penyelenggaraan negara, sedang hak asasi dan kebebasan individu dijamin dengan hukum-hukum biasa, konvensi, atau pun putusan hakim. Hal ini berkaitan dengan Konstitusi Inggris yang tidak dikodifikasikan dalam dokumen tunggal, melainkan tersebar ke berbagai dokumen, piagam, petisi, keputusan pengadilan, konvensi, kebiasaan tradisional, hukum adat, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Konsep *the rule of law* yang dikemukakan oleh Dicey pada tahun 1885 itu telah mengalami perubahan sepanjang perjalanan sejarah praktek ketatanegaraan Inggris. Menurut Wade dan Philips, dari hasil penelitiannya yang dibukukan dalam *Constitutional Law*, bahwa *rule of law* pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan waktu awalnya. Menurutnya, unsur pertama yang berupa supremasi hukum, sampai saat ini masih merupakan unsur yang esensial dari konstitusionalisme Inggris. Hanya saja saat ini ada kelompok-kelompok yang taat pada hukum yang khusus dari kelompoknya serta pelanggaran atasnya diadili dalam pengadilan yang khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan Militer. Walaupun unsur supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, namun saat ini negara turut campur dalam berbagai bidang kehidupan warganya dan negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan apa pun dengan alasan demi kepentingan umum. Hal ini tentu mengurangi kadar supremasi hukum.<sup>25</sup>

Mengenai unsur kesamaan di hadapan hukum, hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara. Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melaksanakan tugas kenegaraannya tidaklah dapat dianggap melanggar *rule of law*. Begitu pula beberapa pengecualian, seperti: (a) hak-hak imunitas raja; (b) hak kekebalan diplomatik; (c) kewenangan Persatuan Dagang untuk mengatur sendiri urusannya ke dalam; dan (d) adanya kekuasaan *abitrage*. Hal ini tidak melanggar *rule of law*, tetapi tentu dianggap mengurangi makna *equality before the law*.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 43



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata terdapat peralihan orientasi dari *rule of law* yang bergaya formilaitas (negara hukum formal) ke orientasi prosedural yang substansial demi keadilan (negara hukum material) sebagai pengaruh dari dinamika pemikiran negara kesejahteraan (*the welfare state*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan, sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Mangaberia dalam *Law in Modern Society* (1976), bahwa telah terjadi meluasnya arti “kepentingan umum”, seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang curang untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, dan pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian campur tangan pemerintah demi kepentingan umum menjadi lebih luas.<sup>26</sup>

Perkembangan *rule of law* menjadi *welfare state* dapat dilihat di Inggris yang telah mengadakan program jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum, dan kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi bagi yang kurang mampu. Di Amerika Serikat yang merupakan Negara Hukum Anglo Saxon juga sudah terdapat serangkaian undang-undang yang mengatur kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 45

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Negara Hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)**

Kalau upaya untuk menghadapi absolutisme kekuasaan para raja di Inggris telah melahirkan konsep *rule of law*, maka di Perancis dan Jerman telah melahirkan konsep *rechtsstaat*. Sejarah *rechtsstaat* di Perancis diawali sejak Revolusi Perancis tahun 1789 sebagai akibat dari kesewenang-wenangan Raja Louis XIV. Menjelang meletusnya Revolusi Perancis 4 Juli 1789, pada tanggal 5 Mei 1789 raja terpaksa mengundang rapat kaum bangsawan, pendeta, dan pedagang ke Istana Versailles. Ini merupakan rapat yang pertama kali diadakan lagi setelah rapat gabungan semacam itu tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1614. Sejak saat itu golongan ketiga, yaitu para pedagang dan orang kaya mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan jalannya kebijaksanaan negara. Kalau pada masa sebelumnya yang berperan dalam kegiatan kenegaraan bersama raja hanyalah kaum bangsawan dan pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis mulai memegang peranan dalam kehidupan bernegara, bahkan semakin lama peran kaum borjuis ini semakin besar terutama ketika raja memerlukan bantuan dana yang besar dari kaum borjuis untuk membiayai peperangan. Jika raja tidak memperhatikan usulan dan kepentingan kaum borjuis maka raja tidak akan mendapatkan bantuan dana tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi yang sama juga terjadi di Jerman. Kaisar Jerman pada waktu itu, yaitu Frederick Willhelm IV, terpaksa menerima orang-orang kaya dan cendekiawan untuk turut berperan dalam pemerintahannya. Kehadiran kaum liberal dan hasil pemikiran para cendekiawan mengenai negara hukum tidak saja memperngaruhi pemerintahan di Jerman, tetapi juga bangsa-bangsa di Benua Eropa (Eropa Kontinental) lainnya. Salah satu tokoh cendekiawan yang sangat berpengaruh di Benua Eropa saat itu adalah Immanuel Kant (1724-1804).<sup>29</sup>

Konsep Negara Hukum Immanuel Kant, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya *Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre*, sering disebut dengan Negara Hukum Liberal. Hal ini disebabkan gagasan tersebut merupakan tuntutan dari kaum borjuis liberal. Keinginan mereka, kaum borjuis liberal itu, untuk terlibat dalam urusan kenegaraan didasarkan atas keinginan agar hak-hak dan kebebasan pribadinya tidak diganggu. Keinginan mereka hanyalah agar dibebaskan untuk mengurus kepentingannya sendiri, sehingga penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan sepenuhnya kepada mereka tanpa campur tangan negara. Dalam pandangan mereka negara hanya berperan menjaga tata tertib dan keamanan, sehingga negara hukum yang digagasnya adalah Negara

<sup>29</sup> *Ibid.*,



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Penjaga Malam (*nachtwachter staat*). Menurut Kant, dalam Negara Hukum Liberal atau Negara Hukum Penjaga Malam, segala tindakan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan harus didasarkan atas hukum, sedang penyelenggaraan perekonomian berasaskan persaingan bebas; *laisse faire, laissez passer*, sehingga siapa yang kuat mereka yang akan menang.<sup>30</sup>

Kelemahan lain dari Negara Hukum Formal gagasan Immanuel Kant, karena hanya memperhatikan aspek formalnya tanpa memperhatikan siapa pembuat hukum itu, maka bisa jadi negara totaliter yang diatur oleh hukum yang dibuat oleh diktator atau penguasa tiran dapat digolongkan sebagai negara hukum.

Ternyata pemikiran tersebut telah mengakibatkan tidak diperhatikannya kepentingan masyarakat banyak. Penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta atau kaum borjuis liberal tanpa campur tangan pemerintah atau negara, ternyata tidak mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat banyak, melainkan hanya mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya serta kemakmuran pada kaum borjuis liberal saja. Akhirnya tujuan dan cita-cita negara hukum tidak dapat dicapai dengan konsep Negara Hukum Liberal ini. Oleh karena itu, Frederich Julius Stahl,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan konsep untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan konsep Negara Hukum Liberal tersebut.<sup>31</sup>

Meskipun dimaksudkan untuk memperbaiki pemikiran Immanuel Kant, ternyata konsep Negara Hukum dari Stahl, sebagaimana dikemukakan dalam karya ilmiahnya *Philosophie des Rechts*, masih sama dengan Kant, yaitu hanya memperhatikan aspek formalnya saja dan mengabaikan aspek materialnya. Karena itu pemikiran Stahl ini sering disebut dengan Negara Hukum Formal. Menurut Stahl, Negara Hukum haruslah mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari:<sup>32</sup>

- 1) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- 2) Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan teori *trias politica*;
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- 4) Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (pemerintah campur tangan dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Keempat unsur negara hukum yang dikemukakan oleh Stahl tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara

<sup>31</sup> *Ibid.*, 50

<sup>32</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undangundang. Ternyata Stahl hanya mengutamakan aspek formalnya, yaitu hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Hasilnya hanya membawa kesamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Sedang dalam pencapaian kemakmuran, sistem penyelenggaraan ekonomi tetap liberal berdasarkan persaingan bebas. Campur tangan pemerintah atau negara dalam penyelenggaraan ekonomi hanya dapat dilakukan bila telah disetujui oleh rakyat melalui undangundang. Negara tidak boleh menyimpang atau pun memperluas peranannya dalam penyelenggaraan perekonomian selain yang ditetapkan oleh undang-undang, artinya harus *wetmatig*. Padahal tidak semua kejadian dan permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari dapat diperkirakan semuanya oleh undang-undang. Pembatasan yang ketat oleh undang-undang ini telah mempersempit ruang gerak pemerintah dalam penyelenggaraan negara, sehingga pemerintah menjadi kaku dan tidak dapat mengelola negara untuk mencapai masyarakat yang bebas dan makmur bagi setiap individu. Dengan demikian adanya *wetmatigheid van het bestuur* yang menjadi ciri utama Negara Hukum Formal yang dikemukakan Stahl tidak dapat menjamin untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara hukum untuk menjamin hak-hak asasi dan kebebasan setiap warga negara demi kesejahteraan kehidupan bersama.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gugatan terhadap konsep Negara Hukum Formal yang memiliki ciri-ciri pasif dalam bidang sosial dan ekonomi semakin gencar dilakukan pada pertengahan abad ke-20. Gugatan itu antara lain dilatarbelakangi oleh: (a) adanya eksese-eksese yang ditimbulkan dari industrialisme dan liberalisme yang selama ini menjadi pijakan Negara Hukum Formal; (b) menyebarnya paham sosialisme yang menghendaki pemerataan distribusi kekuasaan; dan (c) keberhasilan partai-partai sosialis dalam pemilu di beberapa negara Eropa. Di samping itu juga disebabkan oleh berkembangnya pemikiran mengenai Negara Hukum yang lebih demokratis, berperikemanusiaan, dan berkesejahteraan, seperti yang terjadi di Belanda.

Perkembangan pemikiran tentang Negara Hukum di Negeri Belanda juga pernah dikemukakan oleh M. Scheltema dalam Kongres di Fakultas Hukum Rijksuniversiteit di Groningen pada Februari 1899. Menurut Scheltema ada 4 unsur utama negara hukum yang masing-masing unsur utama itu diikuti oleh beberapa unsur turunannya, yaitu:

- 1) Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya meliputi:
  - a) asas legalitas;
  - b) undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa sehingga warga negara dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
  - c) undang-undang tidak boleh berlaku surut;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) hak asasi dijamin dengan undang-undang;
  - e) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
- 2) Asas persamaan, yang unsur turunannya meliputi:
  - a) tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
  - b) adanya pemisahan kekuasaan;
- 3) Asas demokrasi, yang unsur turunannya meliputi:
  - a) hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
  - b) peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
  - c) parlemen mengawasi tindakan pemerintah;
- 4) Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya meliputi:
  - a) hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar;
  - b) pemerintahan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya konsep Negara Hukum Demokratis dikemukakan oleh Paul Scholten dalam karya ilmiahnya *Verzamelde Geschriften* (1935). Menurut Scholten bahwa unsur-unsur negara hukum itu terdiri dari:

- a) Adanya hak warga negara terhadap negara/raja, yang meliputi:
  - (1) hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, seperti kebebasan beragama, berserikat, berrapat, pers, dan hak milik;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) pembatasan atas hak di atas hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku umum sehingga ada kesamaan di hadapan hukum, dan bukan atas kehendak atau kekuasaan raja;

b) Adanya pemisahan kekuasaan yang mengacu pada pendapat Montesquieu dengan beberapa catatan:

(1) kekuasaan pembentuk undang-undang, dengan cara apa pun rakyat hendaklah diikutsertakan dalam kekuasaan ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembentukan undang-undang;

(2) dalam pembentukan undang-undang harus pula diperhatikan aspek materialnya di samping aspek formalnya;

(3) kedudukan yudikatif yang ada pada Mahkamah Agung tidak dapat dikatakan sama derajatnya dengan pembentuk undang-undang, tetapi lebih tinggi, sebab selain mempunyai tugas mengadili pelanggar hukum juga mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pembentukan undang-undang (hak menguji undang-undang);

(4) perlunya diwaspadai adanya kekuasaan pemerintahan yang semakin besar agar jangan sampai kedaulatan hukum beralih menjadi kedaulatan negara.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan pemikiran Negara Hukum pada abad ke-20, menurut pandangan Struycken telah mendorong lahirnya Negara Hukum Baru, yaitu negara hukum yang membagi segala kebutuhan hidup, yang membantu para warga negara dengan berbagai sarana yang diperlukan. Dalam Negara Hukum Modern, negara tidak dapat membebani para warga negara dengan kewajiban melakukan sesuatu, dan tidak dapat memerintah atau melarang, kecuali atas dasar perintah hukum yang ditetapkan secara musyawarah antara pemerintah dan perwakilan rakyat.<sup>36</sup>

Selain hal di atas, Negara Hukum Modern yang berkembang pada abad ke- 20 juga mengandung unsur baru, yaitu: (1) adanya kontrol peradilan terhadap pemerintah; (2) adanya pemberian wewenang kepada pemerintah dalam hal pembuatan undang-undang untuk mengatasi berbagai ketertinggalan legislatif oleh gerak eksekutif; (3) adanya perlindungan hukum terhadap yang berkuasa juga sekaligus pihak yang dikuasai.

Perkembangan dalam pemikiran dan praktik negara hukum di negaranegara Barat telah mengubah pengertian asas legalitas yang semula diartikan pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*) menjadi pemerintah berdasar atas hukum (*rechtmatigheid van het bestuur*). Dalam hal ini pemerintah tidak lagi dianggap sebagai penguasa absolut yang harus dikontrol

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dibatasi, namun pemerintah (penguasa) adalah patner dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran. Untuk itu asas legalitas pun dimaknai lebih longgar lagi menjadi *doelmatigheid van het bestuur* yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum baru, yaitu Negara Kemakmuran (*Welvaarts Staat*). Dalam konsep Negara Kemakmuran, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu sepanjang untuk kepentingan umum agar kemakmuran betulbetul terwujud secara nyata. Untuk itu, meskipun asas legalitas masih dipertahankan, tetapi beberapa modifikasi dilakukan di beberapa negara. Seperti kewenangan pemerintah untuk membentuk undang-undang dengan pembatasan referendum di Swis, atau hak *veto* yang dipunyai Presiden Amerika Serikat untuk menolak undang-undang yang dipandang merugikan negara.

Pemikiran dan praktik kenegaraan di Eropa Barat selanjutnya, yang dimulai tahun 1960, menunjukkan adanya perkembangan pemaknaan negara hukum dari Negara Kemakmuran (*Welvaarts Staat*) menuju kepada Negara Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*). Dalam konsep Negara Kesejahteraan, disamping sebagai penjaga malam, negara dituntut pula untuk memberikan jaminan sosial pada hari tua, memberikan jaminan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan asuransi, dan memberikan jaminan kepada masyarakat yang sedang menganggur. Negara bukan hanya menjaga tata tertib saja, tetapi juga harus turut serta menyelenggarakan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, sebagai penengah sengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>39</sup> Negara tidak cukup hanya menyediakan kemakmuran materi atau kemakmuran jasmaniah saja, tetapi juga kemakmuran rohaniah, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Dengan demikian unsur negara hukum klasik tidak dapat dipertahankan secara mutlak. Pembentuk undang-undang harus rela menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah, agar penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga menerbitkan ketertiban yang adil. Pembentuk undang-undang maupun pemerintah tidak lagi dapat memperkirakan semua kebutuhan undang-undang di masa yang akan datang, sehingga seringkali diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas.

Dari uraian perkembangan negara hukum di atas tampak adanya pergeseran dari status negara hukum formil menuju negara hukum materiil yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan akomodatif dengan melibatkan rakyat dalam proses pembuatan hukum. Usaha untuk semakin mendemokrasikan negara hukum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil ini juga tidak bisa lepas dari peran aktif *International Commission of Jurist* (ICJ) dalam menyebarkan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan perlindungan HAM yang lebih luas yang tidak terbatas pada hak-hak sipil, tetapi juga menyangkut hak politis, ekonomi, sosial, dan kultural.

Hasil kongres *International Commission of Jurist* (IJC) tahun 1955 di Athena menetapkan bahwa prinsip utama negara hukum (*the rule of law*) adalah:

- a) Negara harus tunduk pada hukum;
- b) Pemerintah harus menghormati hak-hak individu;
- c) Hakim harus melindungi dan menjalankan hukum tanpa rasa takut dan tanpa berpihak serta menentang setiap campur tangan oleh pemerintah atau partai politik terhadap kebebasan hakim.

Sedang hasil kongres *International Commission of Jurist* (ICJ) di Bangkok tahun 1965 menetapkan bahwa prinsip-prinsip bagi terselenggaranya *rule of law* adalah:

- a) Adanya perlindungan konstitusional, yaitu bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independency and impartial tribunal*);

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d) Adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
- e) Adanya kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan berposisi;
- f) Adanya pendidikan kewarganegaraan (*civics education*) dalam proses pendewasaan sikap politik masyarakat.

### c. Negara Hukum Sosialis (*Socialist Legality*)

Konsep negara hukum ini dilatarbelakangi kehendak mengimbangi konsep negara hukum *rule of law*. Dalam negara hukum sosialis hukum ditempatkan di bawa sosialisme. Hukum adalah sebagai alat atau sarana untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.<sup>34</sup>

Menurut Bagir manan, bahwa tradisi hukum sosialis bukan terutama didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijakan ekonomi dan sosial. Hukum adalah instrumen kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial.<sup>35</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, ciri konsep negara hukum sosialis sebagai berikut :<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Afika, 2014), h. 46

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 28

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara, terutama pada kaum buruh.
- 2) Berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, lebih mendahulukan tanggung jawab daripada kebebasan.
- 3) Adanya pemisahan secara tajam antara negara dan gereja.
- 4) Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yang diatur secara tegas dalam konstitusi.
- 5) Larangan terhadap berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospektif.
- 6) Kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan untuk mengkritik kaum kapitalis maupun kaum borjuis.
- 7) Hukum dimaknai sebagai alat untuk mencapai sosialisme, posisi hukum adalah subordinasi terhadap sosialisme.

#### d. Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam adalah istilah yang dipakai untuk menyebut negara hukum dalam perspektif Islam. Menurut Azhary,<sup>37</sup> Negara Hukum dalam perspektif Islam memiliki prinsip-prinsip umum yang terdiri dari: (a) kekuasaan sebagai amanah; (b) musyawarah; (c) keadilan; (d) persamaan; (e) pengakuan dan perlindungan terhadap

<sup>37</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta:Predana Media, 2003), h. 85



HAM; (f) peradilan bebas; (g) perdamaian; (h) kesejahteraan; (i) ketaatan rakyat.

Dalam prespektif Islam terdapat 2 teori yang mengkaji tipologi negara dilihat dari aspek kekuasaan. Pertama adalah teori Imam Malik yang didasarkan atas prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* (kemaslahatan umum).<sup>38</sup> Teori ini sangat berpengaruh dalam menentukan prinsip-prinsip umum tentang kenegaraan dalam Islam. Dalam pandangan Imam Malik, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menentukan secara jelas mengenai bentuk Nomokrasi Islam, apakah bentuk kerajaan atau Republik. Karena itu berdasarkan prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* manusia diberi kebebasan dan kewenangan untuk menformat ketatanegaraannya sesuai dengan latar belakang sejarah, sistem politik, ekonomi, sosial, kultural, serta falsafah masing-masing bangsa sepanjang substansinya konsekuen dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Bentuk negara kerajaan atau republik bukanlah ukuran utama dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, karena kerajaan atau republik hanya sekedar bentuk, wadah, dan formalitas. Meskipun bentuk negaranya kerajaan sepanjang konsekuen dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah maka bisa dinyatakan sebagai Nomokrasi Islam. Sebaliknya, meskipun bentuk negaranya republik dengan prinsip demokrasi; dari, oleh, dan untuk rakyat, sepanjang tidak sejalan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, maka tidak dapat dinyatakan sebagai Nomokrasi Islam.

Teori kedua dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406) dalam bukunya *Muqaddimah*.<sup>39</sup> Menurut Khaldun, ada 2 tipe negara, yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*Mulk Tabi'i*) dan negara dengan ciri kekuasaan politik (*Mulk Siyasi*). Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*Mulk Tabi'i*) ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang, absolut, dan cenderung pada hukum rimba sebagaimana lazim diterapkan di negara-negara otoriter, totaliter, dan fasisme. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*Mulk Siyasi*) dibagi lagi menjadi 3, yaitu: (1) Negara hukum atau Nomokrasi Islam (*Siyasah Diniyah*); (2) Negara hukum sekuler (*Siyasah Aqliyah*); (3) Negara ala “republik” Plato (*Siyasah Madaniyah*).

Dari ketiga tipe *Mulk Siyasi* tersebut, menurut Ibnu Khaldun yang paling ideal sebagai bentuk tata politik dan kultural yang permanen adalah *Siyasah Diniyah* (Nomokrasi Islam). *Siyasah Aqliyah* (negara hukum sekuler) hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sedang *Siyasah Madaniyah* (republik ala Plato) merupakan negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Dalam *Siyasah*

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 15

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Diniyah* (Nomokrasi Islam), kecuali berdasarkan syari'ah, yaitu hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, juga menggunakan hukum yang bersumber dari akal pikiran manusia. Menurut Khaldun, ciri ideal suatu negara ialah kombinasi antara syari'ah dan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dengan menggunakan akal manusia. Penggunaan akal manusia di sini dimaksudkan dengan tetap merujuk kepada syari'ah.<sup>40</sup>

Penyebutan Nomokrasi Islam untuk negara hukum dalam perspektif Islam dimaksudkan untuk menghindari penyebutan Theokrasi yang sering digunakan oleh para sarjana barat dalam menyebut negara dalam perspektif Islam di negara-negara Arab. Predikat yang tepat bagi negara Islam adalah Nomokrasi Islam bukan Theokrasi. Sebab konsep Theokrasi tidak ada kaitan sama sekali dengan Islam. Istilah Theokrasi yang berasal dari kata Theos (Tuhan) dan Kratos (pemerintahan) pertama kali dipakai untuk mengidentifikasi karakteristik tipe negara Israel pada awal permulaan era Kristen. Theokrasi digunakan untuk menyebut negara-negara yang diperintah oleh Tuhan atau Tuhan-tuhan, yaitu suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan atau dewa sebagai raja atau penguasa dekat. Karena itu Theokrasi hanya tepat untuk mengidentifikasi negara yang dipimpin oleh pemimpin agama

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 46



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilegitimasi sebagai wakil Tuhan, seperti Paus pada abad pertengahan, atau seperti Negara Vatikan sekarang yang merupakan institusi rokhani yang mendominasi umatnya.<sup>49</sup>

#### e. Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>41</sup> Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.

Menurut Azhary<sup>42</sup>, meskipun konsep Negara Hukum Indonesia yang pernah dikemukakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, erat sekali hubungannya dengan konsep *rechtsstaat*, yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental, tetapi konsep Negara Hukum Indonesia sebetulnya bukanlah tipe *rechtsstaat*. Tipe Negara Hukum Indonesia juga bukan tipe *rule of law*, meskipun unsur-unsur dari *rechtsstaat* dan *rule of law* dapat ditemukan dalam Negara Hukum Indonesia. Menurut Azhary, ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:

- 1) Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
- 2) Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 1 Ayat (3).

<sup>42</sup> Azhary. *Op. Cit.*, hlm. 97

- 3) Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;
- 4) Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
- 5) Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

Padmo Wahyono merumuskan ada 5 (lima) unsur Negara Hukum Pancasila, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Pancasila merupakan sumber hukum nasional yang berarti bahwa bangsa Indonesia menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika;
- 2) MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan perundangan di bawahnya, yang mana undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden yang menunjukkan prinsip legislatif khas Indonesia;
- 3) Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional;
- 4) Adanya persamaan di depan hukum;
- 5) Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Secara konsepsional, seharusnya Negara Hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Secara material, Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada:

<sup>43</sup> Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: In-Hill Co., 1989), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada. Dalam hal ini hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama adalah bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Dengan demikian maka hukum dan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai Hak-hak Asasi Manusia.
- 3) Nilai-nilai persatuan Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan budaya nusantara yang beraneka ragam.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat (hikmat) dan i'tikad baik serta kearifan (kebijaksanaan). Dengan hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis baik secara substansial dan prosedural.
- 5) Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Sedang secara yuridis formal Negara Hukum Indonesia harus didasarkan atas ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, baik dalam dalam UUD, Undang-Undang, maupun peraturan perundangan lainnya. Secara yuridis formal, pilar utama bangunan Negara Hukum Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal adalah:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam: Alinea ke-1 Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28A, 28B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 28E ayat (1), (2), (3), Pasal 28 F, Pasal 28G ayat (1), (2); Pasal 28H ayat (1), (2), (3), (4), Pasa 28 I ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 28 J ayat 1 dan (2), Pasal 29 Ayat (2);
- 2) Adanya prinsip persamaan di depan hukum yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1);
- 3) Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak memihak, yang dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1).
- 4) Adanya jaminan pendidikan dan sosial yang dicantumkan dalam Pasal 34 Ayat (1) dan (2).

Disamping itu terdapat sejumlah peraturan perundangan-undangan di bawah UUD 1945 yang mengatur dan menjabarkan bagaimana mengimplementasikan keempat pilar utama tersebut.

#### 4. Tipe-Tipe Negara Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa negara hukum dibedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materil atau negara hukum Modern. Menurut Munir Fuady, mengemukakan tiga tipe negara hukum :<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Nurul Qamar, *Op, Cit.*, h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Negara Hukum Liberal atau Klasik

Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti sempit, yang tugasnya sesuai dengan jiwa jaman liberal yang hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi.

Utrecht mengatakan bahwa dari segi politik, tugas pokok dari negara hukum liberal hanya menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah dalam arti luas.

Pada negara hukum liberal, tiap turut campur negara dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan sosial dalam masyarakat dilarang secara tegas. Negara tipe ini mempertahankan suatu pemisahan antara negara dengan masyarakat. Pemerintah hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum atau dengan kata lain hanya menjaga keamanan dalam arti sempit.

b. Negara Hukum Formil

Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti sempit, atau negara undang-undang. Hal itu dikarenakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Astim Riyanto (2006;250), mengemukakan bahwa negara hukum formal adalah sebagai negara dimana pemerintahan dan seluruh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang pemerintahan tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang.

Jadi pada negara hukum formil hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang telah terkodifikasi, sehingga orientasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan hanyalah untuk perwujudan kepastian hukum menurut undang-undang, maka disebut negara undang-undang. Kebenaran menurut tipe negara hukum ini adalah kebenaran menurut undang-undang, bukan menurut hukum, niali dan rasa keadilan masyarakat.

c. Negara Hukum Materil

Pada tipe negara hukum materil penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak dimaknai hanya sebatas peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan negara pada tipe ini bertugas untuk menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala aspek dalam masyarakat. Karenanya, pemerintah memiliki tugas yang sangat luas yakni menyelenggarakan kepentingan umum dan penyelenggaraan kesejahteraan umum demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Trias Politica

### 1. Pengertian Trias Politica

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).<sup>45</sup> Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah “*Trias Politica*”. Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yangberarti tiga, “*As*” yang berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan

<sup>45</sup> Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan* (Jakarta: Genta Publishing, 2015), h 68-69

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Yudikatif*. Kekuasaan *Legislatif* adalah membuat undang-undang, kekuasaan *Eksekutif* adalah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan *Yudikatif* adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>46</sup>

Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan *kekuasaan* yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>47</sup> Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balaces*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

## 2. Teori *Trias Politica*

### a. Pemisahan Kekuasaan

Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan

<sup>46</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 85

<sup>47</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h 152



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan *trias politica*-nya. Konsep awal mengenai hal ini dapat dilihat pada tulisan John Locke '*Second Treaties of Civil Goverment*' (1690) yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

John Locke membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isisnya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi :<sup>48</sup>

- 1) Fungsi legislatif.
- 2) Fungsi eksekutif.
- 3) Fungsi federatif.

Untuk membatasi pengertian *separation of powers* itu, dalam bukunya *Constitutional Theory*,<sup>49</sup> G. Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu :

- 1) *Differentiation*. Bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Legislatur membuat aturan,

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 13

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 21

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutor melaksanakannya, sedangkan pengadilan menilai konflik atau perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu dan menerapkan norma aturan itu untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan.

- 2) *Legal incompatibility of office holding*. Menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap pada jabatan di luar cabang legislatif.
- 3) *Isolation, immunity, independence*. Bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan demikian, independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya.
- 4) *Check and balances*. Dimana setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu.
- 5) *Co-ordinate status and lack of accountability*. Semua organ atau lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudisial mempunyai kedudukan sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat *co-ordinatif*, tidak bersifat *sub-ordinatif* satu dengan yang lain.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 22

## b. Pembagian Kekuasaan

Menurut Montesquieu, dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu ini dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>51</sup>

Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalani satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam.<sup>52</sup>

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 283

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Op.cit, h. 31



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.<sup>53</sup>

### 1) Kekuasaan Legislatif

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.<sup>54</sup>

Kekuasaan legislatif juga dikenal dengan istilah lembaga perwakilan rakyat. Menurut John A. Jacobson, bahwa secara umum struktur organisasi lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Praktik *unicameral* dan *bicameral* menurut Bagir Manan, tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Tetapi, kedua bentuk ini

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op.cit, h. 298

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hasil proses panjang praktik ketatanegaraan di berbagai belahan dunia.<sup>55</sup>

Di Inggris, sistem *bicameral* terdiri dari Majelis Tinggi (*The House of Lord*) dan Majelis Rendah (*The House of Commond*). Adapun sistem *bicameral* di USA terdiri dari Senat (*Senate*) sebagai Majelis Tinggi dan DPR (*House of Representative*) sebagai Majelis Rendah.<sup>56</sup>

Di Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen menganut sistem *unicameral* dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Akibat dari itu timbul ketimpangan ketatanegaraan terutama antarlembaga negara, dimana akibat superioritas ini MPR dapat memberikan justifikasi pada semua lembaga negara tanpa kecuali, sehingga eksistensi tiga kekuasaan lembaga (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi semu.<sup>57</sup>

Sidang umum MPR pada tahun 2001 berhasil mengamandemen UUD 1945 dengan mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya kelembagaan negara pada proporsinya,

<sup>55</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, h. 65

<sup>56</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Ibid*, h. 65

<sup>57</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mengembalikan eksistensi lembaga legislative ke sistem *bicameral*. Amandemen ini menempatkan MPR tidak lagi sebagai supremasi, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem *bicameral* dengan membentuk kamar ke dua setelah DPR yaitu DPD adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yakni pusat dan daerah.<sup>58</sup>

Cabang kekuasaan Legislatif memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>59</sup>

#### 1) Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- a) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*)
- b) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*)
- c) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
- d) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*)

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Jmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op.cit, h. 300-310



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Fungsi Pengawasan (*Control*)

Secara teoritis, jika di rinci, fungsi-fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:

- a) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*)
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*)
- c) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budget budgeting*)
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*)
- e) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*)
- f) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

3) Fungsi Perwakilan (*Representasi*)

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sistem perwakilan politik (*political representation*)
- b) Sistem perwakilan territorial (*territorial* atau *regional representation*)
- c) Sistem perwakilan fungsional (*functional representation*)
- 4) Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik

Dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun perwakilan, di dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu terjadi perdebatan antar anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan yang masing-masing memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam memahami dan menyikapi suatu permasalahan. Menurut Friedrich, fungsi parlemen yang pokok justru adalah fungsi representative dan deliberative.<sup>60</sup>

Fungsi deliberatif dan resolusi konflik adalah sebagai berikut:

- a) Perdebatan publik dalam rangka *rule and policy making*.
- b) Perdebatan dalam rangka menjalankan pengawasan.
- c) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam.
- d) Memberikan solusi saluran damai terhadap konflik sosial.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 308

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Kekuasaan Eksekutif**

Menurut Stephen Leacock, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain, bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam satu negara demokrasi, kemauan negara ini dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif.<sup>61</sup>

Kekuasaan eksekutif menurut W. Ansley Wynes, adalah kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>62</sup>

UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 UUD 1945:

Ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

---

<sup>61</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.cit*, h. 107

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 108



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, khususnya dalam menentukan politik negara, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

### 3) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudkatif atau dalam bahasa Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.<sup>63</sup>

Baik dinegara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidential, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Ismail Sunny menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem demokrasi dan negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Op.cit h.310

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.<sup>64</sup>

UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam dua kamar (*bicameral*), Selain itu juga mengadopsi lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, lembaga ini ialah Komisi Yudisial (KY).

#### a) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan , yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).

<sup>64</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.cit*, h. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

- (1) Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum;
- (2) Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
- (4) Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Disamping itu dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap maupun Ad Hoc, diantaranya yaitu:

- (1) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
- (2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Pengadilan Niaga.
- (4) Pengadilan Perikanan.
- (5) Pengadilan Hubungan Kerja Industrial.
- (6) Pengadilan Pajak
- (7) Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab dan Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>65</sup>

c) Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana MA dan MK tetapi tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting yaitu mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 96

guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>66</sup>

## Sistem Pemerintahan

### 1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata “*system*” (Bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, dan yang berasal dari kata “perintah”.<sup>67</sup>

Menurut Titik Triwulan Tutik, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian- bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>68</sup>

Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 99

<sup>67</sup> Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Rieneka Cipta, 2011), h. 38

<sup>68</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Passca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepentingan negara sendiri. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>69</sup>

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.<sup>70</sup> Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga negara.<sup>71</sup>

Jimly Asshiddiqie memberikan batasan rincian tentang sistem pemerintahan dengan menyatakan istilah sistem pemerintahan biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif.<sup>72</sup> Secara lebih

<sup>69</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1994), h. 57

<sup>70</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), h. 120

<sup>71</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000)

<sup>72</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 1996). h. 59



tegas, Asshiddiqie menyebutkan bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.<sup>73</sup>

## 2. Asas Umum Pemerintahan

Asas Umum Pemerintahan atau yang dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan kaidah-kaidah yang memberikan penjelasan penyelenggaraan negara. Asas ini bertujuan untuk mencegah penyelenggaraan negara yang tidak efektif dan efisien. Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 30014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas :<sup>74</sup>

- a. Kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007), h. 311

<sup>74</sup> Muhammad Azhar, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, (Jurnal Notarius, Edisi 08 Nonor 2, 2015) , h. 281

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

- f. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk



hukum yang ditetapkan, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.

### 3. Bentuk-Bentuk Sistem Pemerintahan

Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu Parlementer, Presidensial dan Referendum.<sup>75</sup>

#### a. Sistem Pemerintahan Parlementer

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya dan matihidupnya kabinet bergantung kepada dukungan dalam badan legislatif (asas-asas tanggung jawab menteri).<sup>76</sup> Dalam praktiknya, Miriam Budiardjo menambahkan, sifat serta bobot “ketergantungan” tersebut berbeda dari satu negara dengan negara lain, akan tetapi pada umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 6 ciri umum yang dapat dikembangkan dalam sistem parlementer, antara lain:<sup>16</sup>

<sup>75</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatatanegaraan...* h. 74

<sup>76</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...* h. 210

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen;
- 2) Kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri;
- 3) Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode kerjanya berakhir;
- 4) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen terpilih;
- 5) Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen;
- 6) Adanya pemisahan yang tegas antara Kepala Negara dengan Kepala Pemerintahan.

Terlepas dari hal tersebut, sistem parlementer mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah:

- 1) Dalam sistem parlementer apabila ada ancaman kemandegan hubungan antara eksekutif dan legislatif selalu menemukan jalan keluar karena parlemen dapat membuat mosi terhadap eksekutif.
- 2) Sistem parlementer dipandang lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Sepanjang parlemen masih memberikan dukungan terhadap eksekutif, maka eksekutif dapat terus bekerja, namun sebaliknya apabila parlemen tidak memberikan dukungannya, maka kabinet akan jatuh. Sistem ini memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau mengganti

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang menuntut kepemimpinan baru. Sistem parlementer lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada di parlemen.

Sistem Parlementer disamping mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah:

- 1) Dalam sistem pemerintahan parlementer identik dengan instabilitas eksekutif. Karena adanya ketergantungan kabinet pada mosi tidak percaya legislatif.
- 2) Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh partai politik, serta tidak adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat membahayakan kebebasan individu.

### b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem yang memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif sehingga sistem ini dikenal pula dengan nama sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>77</sup>

Menurut Mahfud MD ciri-ciri dari sistem presidensial yaitu:

- 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;

<sup>77</sup> Suwanto Mulyosudarsono, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen
- 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden;  
dan
- 4) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Tidak jauh berbeda dengan Mahfud MD, Ramlan Surbakti mengemukakan ciri-ciri sistem presidensial antara lain: Pertama, kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas pada sistem presidensial, yakni di tangan presiden, daripada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer dibandingkan dengan kabinet presidensial. Kedua, kebijakan yang bersifat komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak dapat mempunyai fungsi ganda), ikatan partai yang longgar dan kemungkinan kedua badan ini didominasi oleh partai yang berbeda. Ketiga, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan. Keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif.<sup>21</sup>

Secara umum, sistem presidensial memiliki tiga kelebihan dan tiga kekurangan. Kelebihannya yaitu :

- 1) Stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat yang demokratis dari pada pemilihan tidak langsung.
- 3) Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi.

Selain memiliki kelebihan, kelemahannya yaitu :

- 1) Konflik eksekutif-legislatif bisa berubah menjadi jalan buntu adalah akibat dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintah presidensial yang mungkin bertentangan.
- 2) Masa jabatan presiden yang pasti mengurai periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dibutuhkan.
- 3) Dalam sistem ini “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan potensi konfliknya.

### c. Sistem Pemerintahan Campuran

Dalam sistem pemerintahan campuran merupakan perpaduan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan *dual executive system*.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Saldi Isra, *Pergeseran fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jimly, dalam sistem semi presidensial fungsi kepala negara yang dipegang oleh presiden, tetapi fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.<sup>79</sup> Menurut Maurice Duverger, sebuah rezim politik dianggap sebagai quasi presidensial, jika UUD yang menetapkan

- 1) Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
- 2) Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.
- 3) Presiden memiliki lawan politik, namun perdana menteri atau para menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan dapat tetap memegang jabatan seandainya parlemen tidak menunjukkan oposisi kepada mereka.

#### d. Sistem Pemerintahan Referendum

Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi dan sistem presidensial murni. Pembuat undang-undang di bawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih. Dalam sistem ini pertentangan antara eksekutif dan legislatif jarang terjadi.

Perihal pengawasan rakyat dalam bentuk referendum, dikemal dengan dua sistem referendum yaitu :

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 1996). h. 64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Referendum Obligator yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu peraturan undang-undang yang mengingat rakyat seluruhnya, karena sangat penting.
- 2) Referendum fakultatif yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap undang-undang biasa, karena kurang pentingnya, setelah undang-undang itu diumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kelebihan dari sistem referendum adalah setiap masalah negara rakyat ikut serta dalam penyelesaiannya dan kedudukan pemerintah stabil yang membawa akibat pemerintahan akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.

Kelemahannya bahwa tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup bagi rakyat dan sistem ini tidak dapat dilaksanakan jika banyak perbedaan pemahaman antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijakan politik.

Sistem pemerintahan referendum memiliki ciri-ciri:

- 1) Tugas pembuat undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih.

- 2) Legislatif adalah representatif dari rakyat.
- 3) Eksekutif dipilih oleh legislatif untuk tiga tahun lamanya dan dapat dipilih kembali. Kestabilan dari sistem ini dipengaruhi oleh adanya kesepahaman antara eksekutif selaku pemegang kebijakan politik dengan rakyat.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

#### Hak Imunitas

##### 1. Pengertian Hak Imunitas

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu yang disebut sebagai *hak*. Dengandemikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>80</sup>

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut.<sup>81</sup>

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

<sup>80</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014), h. 54

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 55



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. *Comission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pengertian “hak” pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit; kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak oranglain.<sup>82</sup>

Hak imunitas dapat dipahami sebagai hak kekebalan terhadap suatu objek tertentu. Ada beberapa pengertian mengenai hak imunitas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi hak imunitas sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 56

<sup>83</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah hak imunitas sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “immunity” yang mempunyai arti kekebalan, juga dapat diartikan “tidak dapat diganggu gugat”. Kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut.

Sementara itu menurut *Black Law Dictionary*, hak imunitas sebagai berikut: “any exemption from a duty, liability, or service of process such an exemption granted to a public official”.<sup>84</sup> Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka kuranglebih mempunyai arti beberapa pengecualian dari kewajiban dan tanggung jawab dari proses yang diberikan oleh masyarakat resmi, yang dalam aplikasi ketatanegaraan di Amerika mempunyai 2 lingkup wilayah:

- a. Tidak boleh ditangkap pada saat sidang berlangsung, kecuali tindak pidana makar, kejahatan berat, seperti pembunuhan dan terhadap pelanggaran perjanjian perdamaian.
- b. Pada saat setiap pidato, debat, opini, penyampaian pendapat pengambilan suara, laporan tertulis dan penyampaian petisi yang dirasa penting untuk disampaikan dalam rangka fungsi legislatif yang dilakukan dalam sidang parlemen

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia hak imunitas disebut dengan istilah hak kekebalan. Di sini secara etimologi mempunyai 2 pengertian. Pertama, kekebalan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan

<sup>84</sup> Anugerah Andara, “Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegium”, *Diponegoro Law Review*, Vol 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara penerima. Kedua, perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.

Hak kekebalan diplomatik dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian: *Pertama*, kekebalan pribadi, meliputi: a) kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, semisal dari penangkapan dan penahanan, b) perlindungan terhadap gangguan atasdirinya, c) kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan hukum perdata, d) kebebasan terhadap kewajiban menjadi saksi. *Kedua*, kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman pribadi, yang meliputi: a) kebebasan dari paksaan untuk memasuki kantor perwakilan dan kediaman pribadi, b) kebebasan dari pemeriksaan dan penahanan gedung, alat perlengkapan, seperti alat pengangkutan. *Ketiga*, kekebalan korespondensi, meliputi: a) kekebalan arsip dan dokumen yang tidak dapat diganggu gugat, b) kekebalan surat-menyurat perwakilan dan stafnya, c) kekebalan atas diplomatik yang tidak boleh dibuka.<sup>85</sup>

Hak kekebalan (*inviolability right* dan *immunity right*) mengandung 2 pengertian. Dalam pengertian *inviolability*, hak ini berarti: 1) kekebalan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima, dan 2) perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak swasta. Sedangkan dalam pengertian *immunity right* adalah kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.

<sup>85</sup>Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid VI, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bentuk-Bentuk Hak Imunitas

Maka dari beberapa definisi terjemahan kata per kata (*word to word*) maupun terjemahan secara harafiah dapat dipahami bahwa hak imunitas adalah hak yang dimiliki suatu subjek (orang) untuk terbebas dari suatu objek tertentu dikarenakan subjek tersebut memiliki suatu kewenangan atau jabatan sehingga diberikan keistimewaan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.<sup>86</sup>

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian:

- a. Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.
- b. Kekebalan hukum bagi kepala negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas.<sup>87</sup>

Dalam hukum dikenal juga 2 macam hak imunitas, yaitu:

- a. Hak imunitas mutlak, hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk ke dalam hak imunitas mutlak (absolut) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya

<sup>86</sup>Anugerah Andara, *Op. Cit.*, h. 6

<sup>87</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rimba Cipta, 1999), h. 155.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Yang termasuk hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR dapat dikategorikan ke dalam hak imunitas (absolut). Artinya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.<sup>89</sup>

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat dan sebagai cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan

<sup>88</sup> Muhammad Muniri, *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI menurut UU No. 17 Tahun 2014*, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017

<sup>89</sup> Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara*, Jurnal Rechts Vinding, hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014.

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) UU MD3 yaitu terdiri dari dua hal, pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

### 3. Tujuan Hak Imunitas

Hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR bukan tanpa alasan diberikan oleh undang-undang. Namun, semata-mata karena untuk melindungi anggota DPR dari jeratan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota DPR memiliki berbagai hak-hak istimewa. Setiap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang dimiliki sangat membantu kinerja anggota DPR, salah satu hak tersebut adalah hak imunitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR hanya dapat digunakan ketika seseorang anggota menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaankinerja mereka. Anggota-anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak imunitas. Akan tetapi, hak imunitas ini tidak berlaku apabila ada anggota DPR yang melanggar kode etik, seperti melakukan korupsi karena hal tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang mereka miliki.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam UU MD3 memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Batasan Hak Imunitas

Dalam pelaksanaan kebebasan berbicara di Parlemen ini pada prinsipnya tidak ada batasan, artinya bahwa anggota DPR bebas untuk berbicara di Parlemen dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kebebasan berbicara anggota DPR juga berlaku untuk laporan proses atau perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar atau orang lain di luar parlemen, artinya pada saat anggota DPR mengeluarkan pernyataan yang berimplikasi pelanggaran di surat kabar atau tempat lain di luar parlemen, hak imunitas anggota DPR berupa kebebasan berbicara itu akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh hukum.

Dalam negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (*abuse*) terhadap kebebasan berbicara. Jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat absolut, melainkan ada batasan-batasannya. Tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Sebab bagaimanapun juga di alam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi saat ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis karenanya tidak populer bagi masyarakat.

Dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berbicara tidak berarti boleh dilanggar prinsip-prinsip hukum dan moral. Di lain pihak, secara hukum kebebasan berbicara maupun kebebasan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat cukup kuat berlakunya, hampir-hampir tanpa kompromi. Bahkan dalam sistem hukum di negara maju sekalipun, sebenarnya sulit sekali menentukan batas-batas pada saat suatu kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang mana kebebasan tersebut sudah tidak lagi dilindungi.

Menurut direktur eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti mengatakan bahwa hak imunitas atau hak untuk tidak dituntut secara hukum atas pernyataannya di dalam sidang parlemen ada batasnya, yaitu sepanjang untuk menjalankan tugas secara efektif.<sup>90</sup>

Namun dalam pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) No. 17 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa hak kekebalan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintahan dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma, serta adat budaya bangsa. Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) UU MD3 yaitu terdiri dari dua hal. *Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. *Kedua*, mengemukakan hal lain yang

<sup>90</sup>Diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol12252/hak-imunitas-dpr-bukan-terbatas-pada> 27 April 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasiastata, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPR.<sup>91</sup>

Dengan demikian dengan hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam pengemukakan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karenanantinya akan dituntut di jalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

<sup>91</sup>Muniri Muhammad, *Op. Cit.*, h. 43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan DPR dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan apabila anggota DPR terbukti melanggar ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Jenis sanksi tersebut meliputi: *Pertama*, sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tulisan. *Kedua*, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. *Ketiga*, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

#### B. Dasar Hukum

Pemohon terkait putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) selaku Pemohon I, Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. selaku Pemohon II, Yudhistira Rifky Darmawan selaku Pemohon III.

Adapun objek yang dimohonkan yakni terkait pengujian konstiusionalitas Pasal 73 Ayat (3) s/d Ayat (6), Pasal 122 Huruf I dan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Namun secara khusus, peneliti terfokus pada objek penelitian yang tertuang dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahwa Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Terhadap Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan warga negara pemilih dalam Pemilu, tidak pernah memberikan hak imunitas absolut kepada anggota DPR. Kemudian khusus untuk Pemohon I, berdasarkan Pasal 8 Huruf e AD/ART, Pemohon I mempunyai tugas melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum dalam upaya perlindungan-perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme dimana dalam nilai-nilai konstitusionalisme terkandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Oleh karena terdapat kata “tidak” dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian, terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehormatan Dewan” dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh karenanya, pemanggilan dan permintaan keterangan tidak bisa dilakukan sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan merugikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon.

Dengan demikian, apabila Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kata “tidak” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden”,* maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan para Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ialah sebagai berikut;

Sebagaimana yang tertuang pada pasal *a quo*, yang menyatakan:  
*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan”*.

Sebagaimana yang patut dicermati mengenai ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni sebagai berikut;

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon mendalilkan, kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menjamin persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta bertentangan dengan hak imunitas yang termaktub dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 sehingga menurut Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi:

1. Kata “tidak” dalam Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Apabila dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewantidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan, bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden”

Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon pada intinya mempersoalkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20A Ayat (1), Pasal 20A Ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Maka Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi memutuskan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait dengan pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD : *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 haru mendapat persetujuan dari Presiden.”*

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak imunitas anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebenarnya tidak ada yang salah. Karena dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (hak konstitusional) sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum. Tetapi dalam Pasal 245 ayat (1) mengatur bahwa adanya ijin tertulis dari Presiden dengan pertimbangan MKD, sesungguhnya upaya untuk memperluas hak imunitas anggota DPR. Sehingga tindak pidana sulit untuk menjangkau anggota DPR.
2. Ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait izin/persetujuan tertulis Presiden dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 adalah konstitusional menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD dan secara tidak langsung menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut system Presidensil dimana Presiden sebagai sentral kekuasaan Negara termasuk di dalamnya memimpin tiga cabang kekuasaan, termasuk kekuasaan yudikatif yang tentunya dibatasi oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Namun, apabila ditinjau berdasarkan aspek kekuasaan Presiden dalam konsep Negara hukum bahwa ketentuan izin Presiden dalam tahap penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menurut konsep Negara hukum ialah bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan independensi peradilan sebagaimana yang telah dijamin Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

**Tabel V.1**  
**Kontradiktif Pasal 245 Ayat (1) dengan UUD NRI Tahun 1945**

Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018	Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Pasca	Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)	sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 haru mendapat persetujuan dari Presiden.
Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945	Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945	Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

#### Saran

1. Untuk kebutuhan di masa mendatang menuntut suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan rinci mengenai hak konstitusional Presiden RI dalam ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait pemberian izin/persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, meliputi ketentuan pengaturan yang jelas mengenai batasan-batasan penggunaan, mekanisme pelaksanaan, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Apabila kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan parameter tersebut dalam hal ini terkait Pasal 245 ayat (1) UU MD3 ini, maka dapat dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena dianggap tidak selaras dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sesungguhnya legislator diberikan keleluasaan dalam legislasi yang merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan legislator dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

2. DPR bersama Pemerintah, perlu untuk mengatur tentang menindaklanjuti terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diatur secara jelas dan tidak multitafsir dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan, agar tidak ada norma hukum yang bertentangan dan tumpang tindih dalam system perundang-undangan yang berlaku. Serta, demi terciptanya rasa keadilan dalam penegakan hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Aripin, Jaenal, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Alrasid, Harun, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir, Makmur, SH., MH., Purnomowati, Reni Dwi, S.H., M.H., *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2005.
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Masa Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana UI, 1990.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad, Rofiqul Umam, dkk., (ed.), *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie, SH, dan Pakar Hukum*, Jakarta: The Biography Institute, 2007.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Utama, 1994.

Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abu Bakar, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, April 2005.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2010.

Dicey, A.V., *Intoduction to Study of The Law of The Constitution*, Indianapolis: Liberty Fund, 1982.

Elgie, Robert and Moestrup, Sophia, *Semi-Presidentialism Outside Europe: A Comparative Study*, New York: Routledge, 2007.

Fatwa, A.M., *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi : Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Gaffar, Afan, "Amandemen UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kelembagaan" Dalam *Buku Amandemen Konstitusi Dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), 2002.

Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia: Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indroharto, Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Pandangan Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar *Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kantaprawira, Rusadi, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Marbun, B.N. *DPR-RI Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Pustaka Utama, 2000.

Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

MD, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Mustafa, Rachman, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Purnama, Eddy, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Medan: Syah Kuala University Press, 2008.

Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Roestandi, Achmad, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salang, Sebastian, dkk, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.  
Soemantri, Sri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1976.

Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.  
Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2011.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2004

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## JURNAL/MAKALAH HUKUM

Indrayana, Denny, *“Mendesain Presidensial yang Efektif; Bukan “Presiden Sial” Atau „Presiden Sialan”*”, (Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta, 13 Desember 2006.

Indrayana, Denny, *Negara Hukum Pasca-Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 1 No. 1, Juli 2004.

Soemantri, Sri, *“Kekuasaan dan Sistem Pertanggungjawaban Presiden Pasca Perubahan UUD 1945”*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, yang diselenggarakan oleh Depkumham bekerjasama dengan FH Unair dan Kanwil Depkumham Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 9- 10 Juni 2004.

Suny, Ismail, *Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca-Amandemen UUD 1945*, Makalah dipresentasikan pada Seminar tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan FH Unair dan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM RI Prov. Jatim di Surabaya, tanggal 9-10 Juni 2004.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan DPRD

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/201



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "Analisis Kewenangan Preseiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)" yang ditulis oleh :

Nama : TRY FERAYANTI  
NIM : 11427203703  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA.**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SH., MA.**

Penguji 1  
**Lysa Angrayni, SH., MH.**

Penguji 2  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH.**

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3910/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 April 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TRY FERAYANTI  
NIM : 11427203703  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Perpustakaan UIN SUSKA Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:STUDI KOMPERATIF HAK IMUNITAS DPR SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Try Ferayanti Binti Adnan, dilahirkan di Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 5 Februari 1996 sebagai anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Adnan dan Ibunda Sutini, S.Pd. Pada tahun 2002 penulis masuk sekolah di SDS Al Ittihad Aek Nabara, lulus pada tahun 2008, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Bilah Hulu, lulus pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Rantau Utara, lulus pada tahun 2014.

Setelah menamatkan studi di SMK, tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara melalui jalur SBMPTN. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  $\pm$  2 bulan dari Juli hingga Agustus di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Bertepatan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Penulis telah menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dan telah mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun hasil ujian predikat Lulusan Sarjana “Sangat Memuaskan” dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,72.